

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap tahun pemerintah daerah menganggarkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan kebijakan pemerintah. Struktur APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan diproyeksikan pada postur APBD masing-masing pemerintahan kabupaten dan kota.

Belanja daerah merupakan semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih pada tahun anggaran berjalan. Struktur belanja daerah akan diklasifikasikan menurut jenis dan fungsinya, yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi akan dirinci lebih lanjut dalam enam jenis belanja, salah satu di antaranya ialah belanja hibah.

Sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, hibah merupakan bantuan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, badan usaha,

dan badan hukum Indonesia yang peruntukannya telah ditetapkan secara spesifik, tidak mengikat dan tidak diharuskan ada setiap tahunnya. Belanja hibah yang dilakukan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dianggarkan dalam APBD dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah setelah terlebih dahulu mengutamakan terpenuhinya belanja urusan pemerintahan wajib dan pilihan.

Besaran anggaran alokasi belanja hibah tiap daerah tentu tidak bisa disamakan karena masih dipengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) yang dimuat dalam APBD (Suastra, 2017). Demikian halnya pada salah satu kabupaten di Sumatera Selatan yang dijuluki “Bumi Serasan Sekundang”, Kabupaten Muara Enim. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Muara Enim bisa dikatakan amat andil dalam mendukung pendanaan hibah. Dana hibah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar 32.263.626.900 miliar rupiah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 2020).

Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD menguatkan bahwa pemberian hibah diarahkan untuk turut serta atas pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah yang disesuaikan dengan urgensi prioritas kepentingan daerah sehingga teraktualisasinya fungsi pemerintahan berkeadilan yang mengakselerasi pembangunan dan kemasyarakatan daerah Kabupaten Muara Enim. Pembangunan daerah sejatinya harus menjamah seluruh kebutuhan masyarakat agar mampu mewujudkan peningkatan kesejahteraan

Potensi unggulan daerah Serasan Sekundang ini mayoritas di sektor pertanian, termasuk di dalamnya perkebunan, tanaman pangan, hortikultura,

perikanan dan peternakan, kehutanan, serta pertambangan dan energi. Sektor pertanian turut berkontribusi penuh bagi perekonomian Muara Enim, salah satunya didominasi oleh perkebunan karet yang menjadi tumpuan sebagian besar petani daerah. Potensi sektor perkebunan karet di Kabupaten Muara Enim sangat menjanjikan beberapa tahun terakhir. Hal ini didukung dari lahan perkebunan karet pada tahun 2019 seluas 148.377 Ha dengan produksi getah 169.668,08 ton mengalami kenaikan dibandingkan dari tahun 2018 sebesar 167.659,21 ton (Badan Pusat Statistik Kabupaten Muara Enim, 2020). Potensi ini tidak dilepaskan begitu saja oleh pemerintah daerah. Pemda Muara Enim setiap tahun mengalokasikan hibah terencana dalam APBD yang nanti akan dikeluarkan dalam bentuk belanja hibah, termasuk di dalamnya hibah yang diperuntukkan kepada kelompok masyarakat tani karet melalui prosedur dan peraturan yang berlaku.

Meskipun produksinya meningkat, tidak jarang ditemukan banyak masyarakat yang masih membutuhkan uluran tangan pemerintah daerah, seperti dari segi dana, bibit, pupuk, dan lainnya. Di lain sisi, persoalan yang kerap terjadi dalam pengejawantahan proses pemberian hibah biasanya berakut pada kelemahan perencanaan dan penganggaran, proposal yang diajukan kelompok masyarakat, mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban hibah yang fiktif dan hanya memberikan kesan normatif, dana hibah digunakan tidak pada prioritasnya hingga tepat tidaknya sasaran penerima hibah.

Atas dasar kekurangan dan fakta anomali di lapangan, seperti permasalahan di atas, sudah semestinya perlu dikaji proses realisasi pemberian hibah dengan kesesuaian asas kepatutan dan peraturan daerah untuk mempercepat *development*

growth dan *public welfare* tercapai atau belum (Luh et al., 2020). Hal ini tidak luput dari bagaimana *impact* yang dirasakan kelompok masyarakat dan pemerintah daerah di Kabupaten Muara Enim. Berangkat dari kesinambungan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji mekanisme pemberian dana hibah dan dampak yang dirasakan berbagai pihak, yang dituangkan dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “IMPLIKASI PELAKSANAAN HIBAH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT: STUDI PADA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2020”.

1.2 Rumusan Masalah

Proses perencanaan, pengalokasian, dan pemberian hibah diindikasikan belum dilakukan dengan baik sehingga menimbulkan permasalahan dalam realisasi penyaluran belanja hibah APBD. Selain itu, perencanaan yang baik dapat mendukung tujuan belanja hibah agar tepat sasaran, serta berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat dan PAD Kabupaten Muara Enim.

Berdasarkan latar belakang yang dibahas, penulis mengidentifikasi pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perencanaan hingga pelaksanaan belanja hibah di APBD Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2020?
2. Bagaimana manfaat yang dirasakan kelompok masyarakat sebelum dan sesudah diberikan bantuan dana hibah oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020?
3. Bagaimana pengaruh dana hibah kelompok masyarakat terhadap PAD dan kesejahteraan di Kabupaten Muara Enim Tahun 2020?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan yang hendak dicapai penulis dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menguraikan tiap proses dalam pelaksanaan belanja hibah kepada kelompok masyarakat tani oleh Dinas Perkebunan di Kabupaten Muara Enim Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui dan meninjau manfaat yang dirasakan kelompok masyarakat tani sebelum dan sesudah diberikan bantuan dana hibah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020.
3. Untuk mengetahui dan meninjau pengaruh dana hibah kelompok masyarakat tani karet terhadap PAD dan kesejahteraan di Kabupaten Muara Enim Tahun 2020.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini mengambil batasan penulisan dengan objek penelitian yang berfokus pada Kelompok Masyarakat Tani Karet yang menerima bantuan hibah dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada tahun 2020. Penulis juga membatasi pada bahasan hibah yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, *monitoring* dan evaluasi, termasuk *output*, ketercapaian *outcome* dan *impact* yang dihasilkan bagi kelompok masyarakat tani karet sendiri maupun bagi pemerintah daerah setempat.

1.5 Manfaat Penulisan

1. Secara Teoritis
 - a. Penulisan ini menambah pengetahuan dan pengembangan pemahaman dasar analisis dan konsep ilmu akademis, khususnya Pengelolaan Utang dan Hibah, yang berelevansi pada fenomena yang terjadi di daerah tertentu.
 - b. Penulisan ini dapat digunakan untuk mengetahui selaras atau tidaknya antara teori dan kasus yang terjadi di lapangan.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi akademisi: Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangsih dan masukan dalam pengembangan penelitian yang berhubungan dengan ilmu Pengelolaan Utang dan Hibah baik teori maupun praktiknya dalam rangka peningkatan kualitas kesejahteraan dan *good governance*, serta sebagai sumber informasi kepustakaan penelitian berikutnya dan dapat berkontribusi di bidang wawasan keilmuan bagi civitas akademika.
 - b. Bagi pemerintah: Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan, khazanah, dan *helicopter view* dari sudut pandang orang ketiga bagi pemerintah daerah, yakni Dinas Perkebunan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim dalam menangani penyaluran belanja hibah yang terlibat banyak pihak di dalamnya.
 - c. Bagi pembaca: Penelitian ini mampu mengajak dan memberikan intuisi bagi pembaca untuk berpikir dan bertanggung kritis terhadap apa yang sedang terjadi di lapangan, serta menangkap esensi bahwa sebenar-benarnya anggaran dana, termasuk hibah, itu ditujukan dan mampu dimanfaatkan sebesar-

besarnya untuk keperluan masyarakat. Melalui penulisan ini, baik pembaca maupun masyarakat awam dapat memahami bahwa perlu peran aktif kontributif dua arah untuk membangun daerah, tidak lain dan tidak bukan antara pemerintah daerah setempat dan masyarakat daerah itu sendiri.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab I Pendahuluan akan menguraikan gambaran umum Karya Tulis Tugas Akhir yang akan disusun dengan memuat beberapa subbab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data dan metode analisis data, serta sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II merupakan landasan teori yang akan menjelaskan teori-teori yang relevan dan menunjang kondisi yang dibahas dalam Karya Tulis Tingkat Akhir ini. Pada bagian ini akan diperinci untuk membahas konsep otonomi daerah dengan subbagian mencakup keuangan daerah dan pendapatan asli daerah, konsep dasar dan teori kebijakan publik, konsep hibah dan kelompok masyarakat.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada Bab III bagian metodologi penelitian akan membahas jenis metode apa yang akan dipakai dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini, yaitu metode analisis *logic model* dengan menganalisis mulai dari *input*, *process*, *output*, *outcome* dan *impact* suatu fenomena yang diangkat sehingga akan terlihat yang akan diuraikan dalam subbagian mulai dari pengertian, tujuan dan manfaat. Selain itu, juga dimasukkan lokasi penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data (studi

lapangan dan literatur dokumentasi) dan analisis data. Pada bagian pembahasan akan memuat gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan

BAB IV SIMPULAN

Bab IV akan berisikan simpulan atau intisari jawaban atas rumusan masalah dan penjelasan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya. Selain itu, penulis akan menyertakan saran dan keterbatasan penelitian Karya Tulis Tugas Akhir ini untuk perbaikan pengambilan keputusan dan kebijakan kedepannya.